Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota (JRPWK)
e-ISSN 2798-656X | p-ISSN 2808-3113
https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPWK
Tersedia secara online di
Unisba Press
https://publikasi.unisba.ac.id/

Kajian Peran *Stakeholder* dalam Pembangunan Kota Berbasis *Smart Living* di Pagedangan Tangerang

Muchammad Faridh Ridho, Nia Kurniasari*

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

A R T I C L E I N F O

Article history :
Received : 11/2/2023
Revised : 25/6/2023
Published : 16/7/2023

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3
No. : 1
Halaman : 9 - 16
Terbitan : **Juli 2023**

A B S T R A K

Dengan adanya Perda Kabupaten Tangerang yang mengatur pola penggunaan lahan pada RTRW yang menunjukkan bahwa Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang akan dijadikan kawasan perumahan dan permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai *pembangunan* smart living di Kecamatan Pagedangan untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana peran stakeholder diantaranya pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan kota berbasis smart living. Adapun analisis yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan mactor. Output yang dihasilkan dari analisis tersebut adalah matriks pengaruh, matriks posisi, pengaruh langsung dan tidak langsung, konvergensi, divergensi, dan ambivalensi antar aktor dan tujuan pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan. Dari hasil analisis mactor disimpulkan bahwa terdapat 3 stakeholder yang paling berperan dalam pembangunan kota berbasis smart living di Kecamatan Pagedangan yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Sinarmas Land, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang, dilihat dari nilai mobilisation tertinggi pada matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) hasil dari analisis mactor.

Kata Kunci : Kota Pintar; Kehidupan Cerdas; Pemangku Kepentingan.

A B S T R A C T

With the existence of the Tangerang Regency Regional Regulation which regulates land use patterns in the RTRW which shows that Pagedangan Subdistrict, Tangerang Regency will be used as a housing and settlement area with a high level of density. Therefore there is a need for further research regarding the development of smart living in Pagedangan District to find out and identify the extent of the role of stakeholders including the government, community and private sector in the development of cities based on smart living. The analysis used is descriptive qualitative analysis method and factor. The output resulting from this analysis is an influence matrix, position matrix, direct and indirect influence, convergence, divergence, and ambivalence between actors and goals of smart living-based city development in Pagedangan District. From the results of the mactor analysis it was concluded that there are 3 stakeholders who play the most role in the development of smart living-based cities in Pagedangan District, namely the Tangerang Regency Transportation Service, Sinarmas Land, and the Tangerang Regency Regional Development Planning Agency. Judging from the highest mobilization value in the weighted value position matrix (3MAO) result of mactor analysis.

Keywords : Smart City; Smart Living; Stakeholder.

@ 2023 Jurnal Riset Perencanaan wilayah dan Kota Unisba Press. All rights reserved.

Corresponding Author : *niawitaresna@gmail.com
Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar
DOI : https://doi.org/10.29313/jrpwk.v3i1.1816

A. Pendahuluan

Smart city merupakan salah satu strategi pengelolaan dan pengembangan kota baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan waktu dan teknologi. *Smart city* adalah konsep kota pintar yang dirancang untuk membantu berbagai aktivitas masyarakat dan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Selain itu, konsep *smart city* juga dihadirkan sebagai respon terhadap pengelolaan sumber daya yang efisien [1]. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen (2012) bahwa *smart city* adalah entitas menyeluruh yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional kota, kualitas hidup penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal [2]. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, konsep yang dianut oleh sistem pemerintahan lokal dalam pengelolaan masyarakat perkotaan, kedua membutuhkan pengelolaan wilayah atas semua sumber daya secara efektif dan efisien dan ketiga, kota pintar dikatakan mampu menjalankan fungsi penyediaan informasi yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tidak terduga [3]. “Dewasa ini, kota-kota berlomba-lomba membangun kota pintar”, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudian Tara dalam video Indonesia *smart city* Summit “Gerakan Menuju 100 Kota Pintar" 2017 yang diadakan di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip dari (kompas.com, 2017).

Kecamatan Pagedangan dipilih menjadi lokasi studi dikarenakan menurut Perda Kabupaten Tangerang tentang RTRW bahwa Kabupaten Tangerang bahwa Kecamatan Pagedangan akan dijadikan Kawasan Perumahan dan Permukiman (KPP) dengan tingkat kepadatan tinggi. Kecamatan Pagedangan juga memiliki perkembangan perumahan dan permukiman yang pesat, dipengaruhi oleh letak administrasi yang bersebelahan langsung dengan Kota Tangerang Selatan Selatan Sehingga mendapat efek urban sprawl dari kota-kota besar di sekitarnya (Jabodetabek), jabodetabek sangat berkembang sehingga meluas ke daerah Kabupaten Tangerang [4].

Penerapan konsep *smart city* membutuhkan kemauan internal pemerintah dan masyarakat, karena konsep dasar *smart city* adalah pengelolaan kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia dan infrastruktur modern untuk meningkatkan kualitas hidup [5]. Pengembangan kota menjadi *smart city* diawali dengan sebagian besar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam isu-isu prioritas [6]. Untuk memastikan situasi saat ini di lapangan, informasi terbaru juga diperlukan. Oleh karena itu, ketersediaan informasi menjadi masalah terpenting yang harus diselesaikan oleh penyedia layanan *smart city* [7].

“QS Ar-Rum ayat 41 Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

“QS Al-Baqarah ayat 11 Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi! Mereka menjawab, Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”.

Ayat Al-quran surat Ar-Rum ayat 41 diatas dapat kita simpulkan kaitannya terhadap peran *stakeholder* dalam pembangunan kota berbasis *smart living* adalah bahwa Allah SWT menegaskan bahwa kerusakan di bumi diakibatkan oleh hawa nafsu manusia di darat, laut, kota, maupun desa, maka *stakeholder* dalam pembangunan kota berbasis *smart living* harus membangun kota denhgan perencanaan yang baik dan kerjasama antar *stakeholder* pembangunan dalam membangun kota yang berkelanjutan dan layak untuk masyarakat, sehingga tidak menciptakan kerusakan, lalu dilanjut pada QS Al-Baqarah ayat 11, di ayat ini Allah SWT berfirman bahwa janganlah berbuat kerusakan di bumi, namun mereka (manusia) merasa bahwa merekalah yang melakukan perbaikan itu diakibatkan oleh rasa bangga diri yang berlebihan, mereka melakukan kerusakan namun mereka tidak sadar akan hal itu, boleh jadi *stakeholder* merasa sudah melakukan pembangunan yang baik, padahal masih jauh dari kelayakan standar pembangunan kota layak huni (*liveable city*) apalagi *smart living*.

Lalu terdapat embrio *smart living* di sana yaitu perumahan yang di bangun oleh swasta yang sudah sangat modern dan telah menggunakan konsep *smart living* yaitu BSD (Bumi Serpong Damai) yang di kembangkan oleh Sinarmas Land, namun jika keluar dari Kawasan perumahan itu, maka akan terlihat kesenjangannya karena Kawasan perumahan yang berada di pinggiran cluster perumahan swasta ini sangat kurang layak huni apalagi menuju kearah *smart living*, sehingga penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran *stakeholder* dalam pembangunan dan pengembangan *smart living* di Kecamatan Pagedangan.

Menurut Gonsalves et al. yang dikutip oleh Iqbal mendeskripsikan *stakeholder* sebagai siapa yang memberikan dampak dan/atau yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan, dan/atau pembangunan.

Mereka bisa sebagai individu, komunitas, kelompok sosial, atau suatu Lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat golongan masyarakat [8]. *smart city* berkaitan juga dengan *Smart Environment*, Konsep inti dari *Smart Environment* di *smart city* adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan ini tidak bisa hilang dengan pengenalan konsep *smart city* berbasis teknologi [9].

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain yaitu siapa saja aktor yang berperan dalam pembangunan kota berbasis *smart Living* di Kecamatan Pagedangan? dan bagaimana pemetaan peran *stakeholder* terhadap pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan?.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu mactor. Analisis mactor merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pergerakan aktor (*stakeholder*) dan strategi dalam mengatasi suatu permasalahan. Hasil yang didapat dari analisis mactor dalam penelitian ini yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam penanganan pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan dan tujuan-tujuan utama yang akan dicapai oleh aktor (program prioritas). Hasil akhir analisis ini yaitu matriks posisi bernilai tertimbang (3MAO) berupa tabel yang akan ditampilkan pada metodologi penelitian.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti pada analisis mactor, yaitu mengidentifikasi aktor (*stakeholder*), mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai oleh aktor (*stakeholder*), memformulasikan isu-isu strategis yang tertera, mengisi matriks pengaruh langsung (MDI), mengisi matriks posisi penilaian (2MAO), menganalisis dari software MACTOR, menginterpretasikan hasil analisis.

Tabel 1. Identifikasi Responden/Aktor/*Stakeholder*

No	Aktor (*stakeholder*)	Kode
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Tangerang	BAPPEDA
2	Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman (DPPP) Kab. Tangerang	DPPP
3	Kecamatan Pagedangan	KECA
4	Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang	DTRB
5	Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Tangerang	DISHUB
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang	DLHK
7	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang	DISKOMINFO
8	Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang	DINKES
9	Pengembang Perumahan Permukiman Sinarmas Land	SML
10	Tokoh Masyarakat	TOMASY
11	Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Komisi Pembangunan	DPRD

Sumber: Hasil analisis, 2022

Total responden dalam penelitian ini adalah 11 responden yang terbagi menjadi pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, Adapaun tahap pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling, yaitu dimana peneliti memilih responden yang memiliki karakteristik tertentu. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut responden yang mewakili institusi yang terkait dengan pambangunan kota berbasis *smart living*, institusi atau lembaga tersebut memiliki hubungan erat dengan berbagai kegiatan pembangunan kota berbasis *smart living*, responden merupakan pihak yang dinilai memahami persoalan seputar pembangunan kota berbasis *smart living*, responden merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan untuk mendukung pembangunan kota berbasis *smart living*.

C. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Daftar Tujuan Strategis

Kode	Tujuan Strategis
A.	Aspek Harmony
A1	Terintegrasinya antara pusat permukiman, pusat kegiatan perkantoran dan pusat kegiatan rekreasi melalui sistem informasi terpadu
A2	Terdapat aksesibilitas yang tinggi agar terkoneksi antar pusat kegiatan
A3	Adanya aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kegiatan permukiman, perkantoran dan rekreasi (efisiensi)
A4	Penataan Ruang dan wilayah sudah didukung oleh informasi data spasial
B.	Aspek Health
B1	Terdapat Akses terhadap makanan minuman, akses terhadap sarana Kesehatan dan olahraga
B2	Tersedianya pasar yang mudah diakses oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman
B3	Tersedianya rumah sakit, apotek, puskesmas yang mudah diakses oleh masyarakat
B4	Tersedianya akses pelayanan kesahatan melalui sistem informasi terpadu
B5	Tersedianya sport center, jogging track, jalur sepeda, taman kota yang mudah diakses oleh seluruh masyarkat
B6	Adanya aplikasi untuk menjangkau secara online kegiatan-kegiatan diatas agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas tersebut.
C	Aspek Mobility
C1	Tersedia sistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas terhadap individu, klompok maupun pemenuhan logistic suatu daerah
C2	Aksesibilitas transportasi umum telah menjangkau semua daerah dengan baik
C3	Tersedia terminal, halte, jalur sepeda, dan moda angkutan yang terintegrasi secara online menggunakan aplikasi
C4	Tersedia moda angkutan massal yang layak dan berkualitas
C5	Terdapat aplikasi pengecekan nomor kendaraan secara online
C6	Penerangan jalan yang sudah optimal
D.	Aspek Kebijakan
D1	Adanya dukungan peraturan terkait dengan pembangunan kota dan ketersediaan pelayanan standar hidup berbasis *smart living*
D2	Adanya Dukungan anggaran yang baik untuk mewujudkan seluruh program pembangunan kota berbasis smart living
D3	Adanya Dukungan pengelola kota dari pemerintah, swasta, dan masyarakat
D4	Adanya Dukungan investor dalam pembangunan kota berbasis smart living.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tujuan yang digunakan adalah untuk mengetahui tingkat pengaruh tiap *stakeholder* dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Tujuan strategis ini adalah hasil penjabaran dari Tabel Benchmarking indikator *smart living* yaitu indikator *smart living* menurut Master Plan *smart city* Kemenkominfo 2017 yaitu *Harmony* (Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis antara permukiman, pusat kegiatan bisnis dan rekreasi keluarga, lalu *Health* (Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman, akses terhadap pelayanan Kesehatan yang mudah dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga) dan terakhir *Mobility* (Mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin midahnya mobilitas bagi individu, *public* maupun *logistic* suatu daerah) [10]. Berikut gambar tujuan strategis dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di kecamatan pagedangan kabupaten Tangerang.

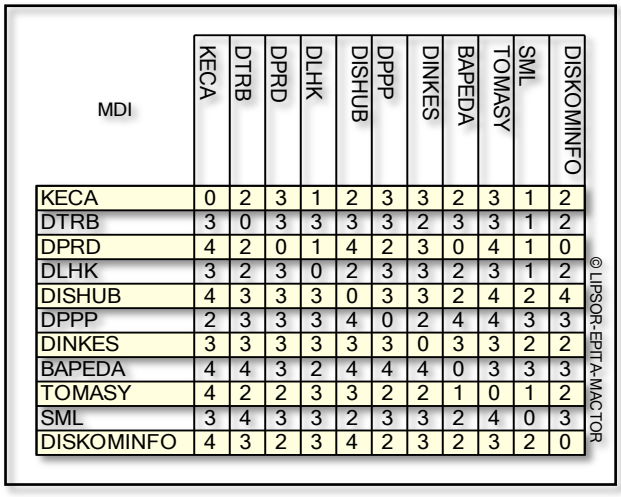

MDI	KECA	DTRB	DPRD	DLHK	DISHUB	DPPP	DINKES	BAPEDA	TOMASY	SML	DISKOMINFO
KECA	0	2	3	1	2	3	3	2	3	1	2
DTRB	3	0	3	3	3	3	2	3	3	1	2
DPRD	4	2	0	1	4	2	3	0	4	1	0
DLHK	3	2	3	0	2	3	3	2	3	1	2
DISHUB	4	3	3	3	0	3	3	2	4	2	4
DPPP	2	3	3	3	4	0	2	4	4	3	3
DINKES	3	3	3	3	3	3	0	3	3	2	2
BAPEDA	4	4	3	2	4	4	4	0	3	3	3
TOMASY	4	2	2	3	3	2	2	1	0	1	2
SML	3	4	3	3	2	3	3	2	4	0	3
DISKOMINFO	4	3	2	3	4	2	3	2	3	2	0

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 1. Matriks Pengaruh Langsung (MDI)

Pengaruh dinilai dari 0 hingga 4 sesuai dengan pentingnya kemungkinan bahaya aktor dengan keterangan sebagai berikut:

0: Tidak ada pengaruh
1: Prosedur operasi
2: Proyek
3: Misi
4: Eksistensi

Data matriks diatas menunjukkan penilaian aktor antar aktor terhadap peran meraka dalam pembangunan kota berbasis *smart living.* Dalam penilian ini tiap aktor tidak boleh menilai dirinya sendiri, dan peniliaian terbagi menjadi 0 yang berarti aktor menilai bahwa aktor lain tidak ada pengaruh terhadap pembangunan kota berbasis *smart living,* skor 1 berarti aktor menilai aktor lain bahwa pengaruh aktor yang dinilai hanya memenuhi prosedural, sedangkan nilai 2 berarti aktor tersebut ada kegiatan dalam pembangunan *smart living* namun tidak berdampak ke aktor lain, lalu nilai 3 berarti aktor tersebut memiliki kegiatan yang berpengaruh dalam pembangunan berbasis *smart living* terhadap aktor lain, namun berkelanjutan. Sedangkan nilai 4 menunjukkan bahwa aktor tersebut memiliki kegiatan dalam pembangunan kota berbasis *smart living*, memiliki pengaruh kepada aktor lain dan berkelanjutan.

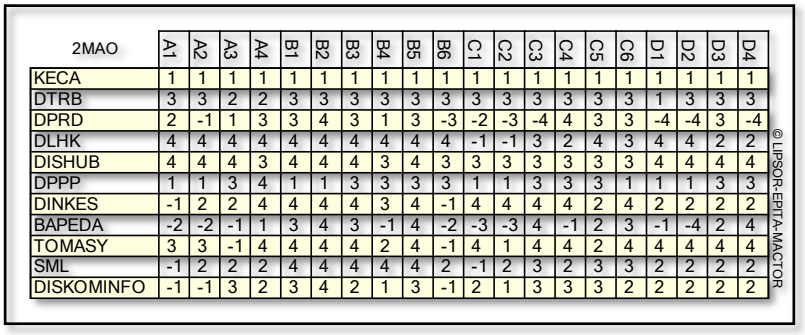

2MAO	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4
KECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DTRB	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
DPRD	2	-1	1	3	3	4	3	1	3	-3	-2	-3	-4	4	3	3	-4	-4	3	-4
DLHK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-1	-1	3	2	4	3	4	4	2	2
DISHUB	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
DPPP	1	1	3	4	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1	1	1	3	3
DINKES	-1	2	2	4	4	4	4	3	4	-1	4	4	4	4	2	4	2	2	2	2
BAPEDA	-2	-2	-1	1	3	4	3	-1	4	-2	-3	-3	4	-1	2	3	-1	-4	2	4
TOMASY	3	3	-1	4	4	4	4	2	4	-1	4	1	4	4	2	4	4	4	4	4
SML	-1	2	2	2	4	4	4	4	4	2	-1	2	3	2	3	3	2	2	2	2
DISKOMINFO	-1	-1	3	2	3	4	2	1	3	-1	2	1	3	3	3	2	2	2	2	2

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 2. Matriks Posisi Bernilai (2MAO)

Nilai diatas menunjukkan apakah aktor tersebut kemungkinan akan mencapai tujuan atau tidak.
Keterangan:
0: Objektif memiliki hasil yang suram.
1:Objektif membahayakan prosedur operasi aktor (manajemen, dll)/sangat penting untuk prosedur operasinya.
2: Objektif membahayakan keberhasilan proyek aktor/sangat penting untuk keberhasilan proyek-proyeknya.
3: Objektif membahayakan pencapaian misi aktor/tidak dapat disangkal untuk misinya.
4: Objektif membahayakan keberadaan aktor/tidak dapat disangkal keberadaannya.

Tabel matriks posisi penilaian (2MAO) menunjukkan penilaian aktor terhadap tujuan isu strategis yang telah ditentukan. Dari hasil peniliaian aktor diatas akan menghasilkan neraca skala kompetitif dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan pada gambar 5.4, gambar 5.5, gambar 5.6, dan gambar 5.7, yang menggambarkan berapa banyak aktor yang setuju atau memberikan nilai positif (+) dan berapa banyak aktor yang tidak setuju dengan tujuan dan memberikan nilai negatif (-) terhadap tujuan yang telah di tentukan berdasarkan variabel *smart living*.

3MAO	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D4	Mobilisation
KECA	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	14.3
DTRB	2.9	2.9	2.0	2.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	1.0	2.9	2.9	2.9	54.9
DPRD	1.2	-0.6	0.6	1.7	1.7	2.3	1.7	0.6	1.7	-1.7	-1.2	-1.7	-2.3	2.3	1.7	1.7	-2.3	-2.3	1.7	-2.3	33.8
DLHK	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	-0.9	-0.9	2.7	1.8	3.6	2.7	3.6	3.6	1.8	1.8	59.8
DISHUB	4.1	4.1	4.1	3.1	4.1	4.1	4.1	3.1	4.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1	73.5
DPPP	1.1	1.1	3.4	4.6	1.1	1.1	3.4	3.4	3.4	3.4	1.1	1.1	3.4	3.4	3.4	1.1	1.1	1.1	3.4	3.4	49.2
DINKES	-1.1	2.1	2.1	4.2	4.2	4.2	4.2	3.2	4.2	-1.1	4.2	4.2	4.2	4.2	2.1	4.2	2.1	2.1	2.1	2.1	62.3
BAPEDA	-2.8	-2.8	-1.4	1.4	4.2	5.6	4.2	-1.4	5.6	-2.8	-4.2	-4.2	5.6	-1.4	2.8	4.2	-1.4	-5.6	2.8	5.6	69.5
TOMASY	2.0	2.0	-0.7	2.7	2.7	2.7	2.7	1.3	2.7	-0.7	2.7	0.7	2.7	2.7	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	43.7
SML	-1.4	2.8	2.8	2.8	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.8	-1.4	2.8	4.2	2.8	4.2	4.2	2.8	2.8	2.8	2.8	70.6
DISKOMINFO	-1.1	-1.1	3.4	2.3	3.4	4.5	2.3	1.1	3.4	-1.1	2.3	1.1	3.4	3.4	3.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	48.7
Number of agreements	15.7	19.5	22.7	29.1	34.3	37.4	35.5	25.6	38.0	16.6	17.1	16.7	32.9	27.4	29.4	29.9	20.4	22.4	27.4	28.4	
Number of disagreements	-6.4	-4.5	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	0.0	-7.4	-7.6	-6.8	-2.3	-1.4	0.0	0.0	-3.7	-7.9	0.0	-2.3	
Degree of mobilisation	22.1	24.0	24.8	29.1	34.3	37.4	35.5	27.0	38.0	24.0	24.7	23.5	35.3	28.8	29.4	29.9	24.2	30.3	27.4	30.8	

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 3. Matriks Posisi Bernilai Tertimbang hasil analisis software Mactor (3MAO)

Keterangan:
Nilai-nilai positif mewakili mobilisasi aktor menuju tujuannya.
Nilai negatif mewakili tingkat oposisi.

Dilihat dari gambar diatas bahwa terdapat 3 aktor teratas yang memiliki nilai atau skor "*mobilisation*" tertinggi. Pertama adalah Dinas Perhubungan dengan nilai skor 73,5. Lalu kedua adalah Sinar Mas Land dengan nilai skor 70,6 dan ketiga adalah Badan perencanaan daerah kabupaten tangerang dengan nilai skor yaitu 69,5. Dapat diartikan 3 aktor tersebut menjadi 3 aktor teratas yang pergerakannya paling signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan dan makin kecil nilai yang dimiliki aktor maka makin kecil pengaruhnya terhadap Pembangunan Kota Berbasis *smart living*.

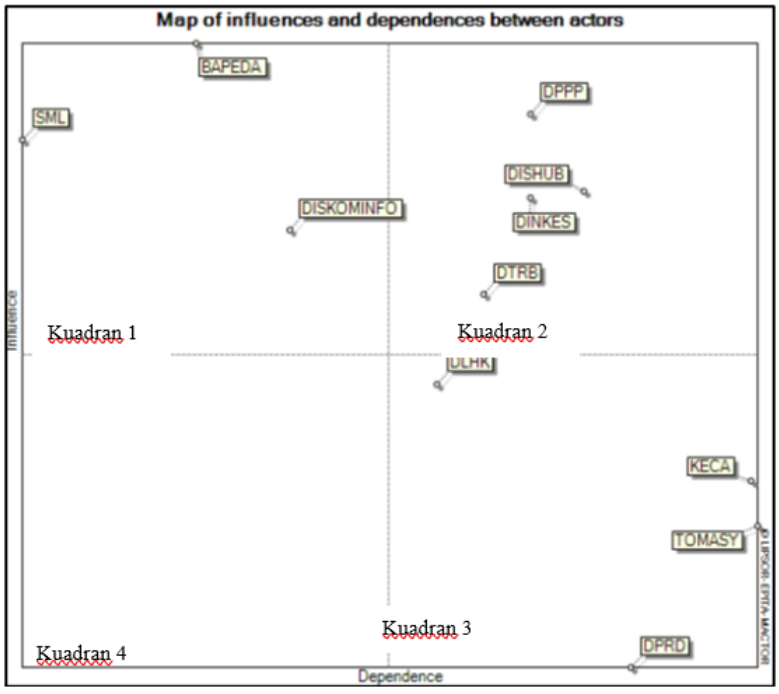

Gambar 4. Pemetaan Pengaruh dan Ketergantungan antar Aktor

Kuadran 1 adalah aktor/instansi yang memiliki pengaruh besar namun tidak tergantung pada aktor-aktor lainnya. Kuadran 2 adalah aktor/instansi yang memiliki pengaruh dan juga memiliki ketergantungan terhadap aktor-aktor lainnya. Kuadran 3 adalah aktor/instansi yang memiliki ketergantungan terhadap aktor lain namun tidak terlalu berpengaruh dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan. Kuadran 4 aktor/instansi dalam kuadran ini tidak memiliki pengaruh dan tidak pula bergantung pada aktor lain, dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dan wawancara mendapatkan hasil bahwa tidak ada aktor/instansi yang tidak memiliki pengaruh dan tidak bergantung terhadap aktor lain dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas menggunakan analisis mactor bahwa aktor (*stakeholder*) mana saja yang berperan dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, yaitu 11 (sebelas) aktor memiliki perannya masing-masing namun terdapat 3 aktor teratas yang memiliki nilai atau skor "mobilisation" tertinggi pertama adalah Dinas Perhubungan dengan nilai skor 73,5 kedua Sinarmas Land dengan nilai skor 70,6 dan ketiga adalah Bappeda dengan nilai skor yaitu 69,5. Dapat diartikan 3 aktor tersebut menjadi 3 aktor teratas yang pergerakannya dan memiliki peran paling signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan.

hasil pemetaan *stakeholder* dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan. Berikut hasil pemetaan peran *stakeholder* dalam pembangunan kota berbasis *smart living*. Bahwa dilihat dari pemetaan pengaruh dan ketergantungan antar aktor/Instansi pada gambar 1 sebagai berikut: Kuadran 1 adalah aktor/instansi yang memiliki pengaruh besar namun tidak tergantung pada aktor-aktor lainnya. Di kuadran ini terdapat 3 aktor yaitu Sinarmas Land, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang (Bappeda), dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang (Diskominfo). Aktor-aktor ini berperan dalam pembangunan kota berbasis *smart living* Kecamatan Pagedangan namun tidak tergantung dengan aktor-aktor lainnya karena mereka menjadi penentu pembangunan dan perencanaan dari segi kebijakan, peraturan, dan pendanaan dalam pembangunan kota berbasis *smart living*.

Kuadran 2 adalah aktor/instansi yang memiliki pengaruh dan juga memiliki ketergantungan terhadap aktor-aktor lainnya. Pada kuadran ini terdapat beberapa aktor yaitu Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang (DPPP), Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang (Dishub), Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (Dinkes), dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Kangerang (DTRB). Aktor-aktor tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan, karena aktor/instansi tersebut berperan sebagai dinas teknis yang langsung turun dalam pembangunan pengawasan dan opelaksanaan perencanaan kebuijakan yang telah di tetapkan dan diatur oleh aktor/instansi pada kuadran 1.

Kuadran 3 adalah aktor/instansi yang memiliki ketergantungan terhadap aktor lain namun tidak terlalu berpengaruh dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan, aktor/instansi didalam kuadran 3 (tiga) ini antara lain adalah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang (DLHK), Kecamatan Pagedangan, Tokoh Masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang (DPRD). Aktor-aktor ini tidak terlalu berpengaruh dalam pembangunan kota berbasis *smart living* namun sangat bergantung terhadap aktor lainnya dikarenakan aktor ini adalah aktor yang berperan dalam menyampaikan aspirasi untuk kesesuaian kebutuhan pembangunan. Untuk Dinas Lingkungan Hidup dan kesehatan hanya berperan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pembangunan kota berbasis *smart living* dalam sektor kebersihan jalur distribusi pengelolaan persampahan dan limbah masyarakat.

Kuadran 4 aktor/Instansi dalam kuadran ini tidak memiliki pengaruh dan tidak pula bergantung pada aktor lain, dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dan wawancara mendapatkan hasil bahwa tidak ada aktor/instansi yang tidak memiliki pengaruh dan tidak bergantung terhadap aktor lain dalam pembangunan kota berbasis *smart living* di Kecamatan Pagedangan.

Daftar Pustaka

[1] D. Kurnaedi, "Penerapan 'Live' Smart City Kota Tanggerang," *Technology Acceptance Model*, vol. 8, no. 1, pp. 18–28, 2017.

[2] B. Cohen, "The Top 10 Smart Cities On The Planet," *Fast Company*, Jan. 11, 2012.

[3] S. W. Mursalim, "Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung," vol. 14, no. 1, 2017, [Online]. Available: https://lestarinurbudi.wordpress.com/2016/06/08/ban

[4] I. F. Robbany, A. Gharghi, and K.-P. Traub, "Land Use Change Detection and Urban Sprawl Monitoring in Metropolitan Area of Jakarta (Jabodetabek) from 2001 to 2015," *KnE Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 257–268, Dec. 2019, doi: 10.18502/keg.v4i3.5862.

[5] Y. Widayanto, *Data base teknologi daerah cerdas*. BPPT PRESS, 2017.

[6] A. Hasibuan and O. K. Sulaiman, "Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara," *Buletin Utama Teknik*, vol. 14, no. 2, pp. 1410–4520, 2019.

[7] E. C. W. Utomo and M. Hariadi, "Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota," *Jurnal Strategi dan Bisnis*, vol. 4, no. 2, 2016.

[8] M. Iqbal, "Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian," *Jurnal Litbang Pertanian*, vol. 26, no. 3, 2007.

[9] F. Fauzan and E. Syaodih, "Kajian Implementasi Smart Environment di Kota Bandung," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 1, no. 2, pp. 167–174, Feb. 2022, doi: 10.29313/jrpwk.v1i2.481.

[10] Diskominfostandi Kota Bogor, *Master Plan Smart City*. 2017.